

Dampak reformasi terhadap elektabilitas partai Golkar pada pemilu 1999 di Kabupaten Malang

Ahmad Hibatullah Habibi Al Asari¹, Ari Sapto²

¹Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, ahmad1hibatullah@gmail.com

²Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, ari.sapto.fis@um.ac.id,

Abstract

The Golkar Party had considerable influence in Indonesia during the New Order era, not least in Malang Regency. This high enough electability was enough to make Golkar's power firmly entrenched, at least until the 1997 elections. This study focuses on the discussion on the electability of the Golkar party in Malang Regency in the 1999 election and its comparison with the 1997 election which is quite contradictory, as well as its relationship to reform events in 1998. Research It uses a historical method that involves in-depth reading of sources from archives, articles, books, interviews, photographs and news articles in newspapers. This study shows that as a result of the reform event, the electability of the Golkar party in Malang Regency fell drastically, in contrast to the 1997 election, however, of the 48 parties that participated in the 1999 election, the Golkar party was still able to occupy the third position for the Malang Regency legislative election.

Keywords

Electability; Golkar; Election.

Abstrak

Partai Golkar memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia pada masa Orde Baru, tak terkecuali di Kabupaten Malang. Elektabilitas yang cukup tinggi cukup untuk membuat kekuasaan Golkar melekat kuat, setidaknya sampai pemilu 1997. Studi ini memfokuskan pembahasan pada elektabilitas partai Golkar di Kabupaten Malang pada pemilu 1999 dan perbandingannya dengan pemilu 1997 yang cukup bertolak belakang, serta hubungannya dengan peristiwa reformasi pada 1998. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang melibatkan pembacaan yang mendalam terhadap sumber dari arsip, artikel, buku, wawancara, foto dan berita di koran. Penelitian ini menunjukkan bahwa akibat peristiwa reformasi, elektabilitas partai Golkar di Kabupaten Malang menjadi turun drastis, berbanding balik dengan pemilu 1997, meskipun demikian dari 48 partai yang mengikuti pemilu 1999 partai Golkar masih dapat menduduki posisi ketiga untuk pemilihan legislatif Kabupaten Malang.

Kata kunci

Elektabilitas; Golkar; Pemilu.

**Received: 11 August 2022*

**Accepted: 30 January 2023*

**Revised: 4 January 2023*

**Published: 31 January 2023*

PENDAHULUAN

Tahun 1998 merupakan fase baru dalam perubahan sejarah di Indonesia. Di masa ini dimulainya masa yang disebut Era Reformasi. Turunnya era Orde Lama

membawa suatu sistem baru demokrasi di Indonesia. Pada masa orde baru segala macam kegiatan politik terkesan menjadi suatu sistem politik yang cenderung otoriter. Ketika muncul peristiwa reformasi banyak terjadi persoalan yang terjadi di Indonesia. Persoalan ekonomi yang akhirnya nanti merembet di sosial-politik berdampak langsung terhadap stabilitas kepemimpinan Soeharto.

Runtuhnya rezim orde baru yang beralih pada era reformasi membawa dinamika baru untuk berkembangnya demokrasi di Indonesia ke arah yang luas. Berbagai upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali wajah demokrasi, salah satunya kebebasan mendirikan partai politik dan mengadakan pemilihan umum secara demokratis pertama di era reformasi tahun 1999. Dukungan tersebut dituangkan dengan ketetapan MPR Nomor XIV/MPR/1998 Pasal 1 angka 5 “pemilihan umum yang dimaksud dalam ketetapan ini diikuti oleh partai-partai politik yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama” Begitupun dampak yang terjadi terhadap perkembangan partai politik di Indonesia. Pembatasan yang terjadi pada era Orde Baru, terjadi perubahan drastis pada masa Reformasi. Bermunculan partai-partai baru terdapat 48 partai terdaftar dalam kontestasi pemilu 1999 Tentunya hal ini sangat kontras dari pemilu sebelumnya pada tahun 1997 yang hanya berisikan tiga partai peserta pemilu (Labolo & Ilham, 2017). Bertambahnya peserta partai pemilu berakibat dengan semakin banyaknya suara yang terpecah. Hal ini berdampak langsung pada perolehan suara partai lama yang kembali ikut dalam kontestasi.

Partai Golkar merupakan partai yang paling besar terdampak pada peralihan sistem multipartai. Tak hanya faktor perubahan sistem pemilihan yang terjadi. Perubahan kondisi politik di Indonesia merupakan dampak terbesar pada hasil elektabilitas Partai Golkar ini. Hal ini terjadi karena hubungan Partai Golkar yang sangat erat terkait dengan pemerintahan Rezim Orde Baru. Dalam masa Orde Baru Golkar dalam banyak hal bekerja secara optimal sebagai mesin kekuasaan Soeharto yang melakukan mobilisasi, intimidasi, teror dan sebagainya kepada massa pemilih. Mobilisasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dukungan massa yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan kekuasaan Soeharto, sedangkan teror dan intimidasi merupakan cara lain yang dilakukan oleh birokrasi dan tentara guna memaksa massa pemilih Golkar dalam setiap kali pemilu (Sahdan, 2004).

Penulis diilhami dengan penulisan buku berjudul *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Isu Strategis* karya Muhamdam Lambolo dan Teguh Ilham. Di sini penulis mendapatkan gambaran terkait definisi politik khususnya mengenai partai politik dan pendalaman atas sistem demokrasi di Indonesia. Hal yang didapat oleh penulis mengenai gambaran tentang bagaimana suatu sistem perpolitikan di Indonesia berlangsung dari masa Orde lama hingga era Reformasi. Penjelasan tentang hasil dari suatu pemilu yang terlaksana di Indonesia yang diuraikan secara runtut, selain itu dalam kajian yang penulis ambil dari karya ini terkait dengan pedoman tata aturan dalam proses pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Terkait dengan buku di atas penulis juga memperkuat literasi kajian dengan sumber buku yang berjudul *Beringin Membangun* karya Bahtiar Efendy dan tim. Dalam literasi ini penulis mendapatkan bagaimana perjalanan partai di sejarah perpolitikan di Indonesia. Penulis mendapatkan informasi terkait dengan sejarah terbentuknya partai Golkar hingga bagaimana partai Golkar berhasil *struggle* dalam era perkembangan situasi nasional di era Reformasi. Penulis juga memiliki pandangan perbandingan kepenulisan dari salah satu skripsi berjudul “Eksistensi Partai Golkar dalam Politik Lokal: Studi Kasus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungung tahun 2004-2009” karya Kairunnisa Lubis. Penulisan tersebut memiliki kesamaan perihal studi kasus. Hal yang membedakan disini adalah terkait temporal dan spasial dalam perumusan masalahnya. Penulisan ini memberikan beberapa contoh terkait fokus kajian dalam gambaran pembahasannya supaya dalam melakukan kepenulisan topiknya tidak terlalu luas.

Skripsi dari Muh. Yunus yang berjudul “Pengaruh Elit Politik Terhadap Elektabilitas Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat Dapil 2 Pada Pemilu 2014 di Kota Makassar” juga memiliki kesamaan jenis dengan pembahasan penulis. Dari skripsi tersebut penulis dapat memperkirakan bagaimana jalannya penelitian penulis, walaupun bukan acuan utama namun skripsi dari Muh. Yunus cukup memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh suatu hal terhadap elektabilitas suatu partai pada tahun dan tempat tertentu. Pola yang sama namun dengan fokus pembahasan yang sangat berbeda. Reformasi yang juga merupakan salah satu pembahasan dalam penulisan ini sehingga penulis memakai gambaran persoalan reformasi yang terjadi di Indonesia dari pandangan buku *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto* karya Gregorius Sahdan. Dalam karya ini penulis mendapatkan gambaran mengenai persoalan politik. Dijelaskan pula bagaimana persoalan politik demokrasi di Indonesia pra dan pasca reformasi. Ini merupakan salah satu yang penulis pandang sebagai sesuatu kepenulisan yang netral dan bermanfaat untuk digunakan dalam kepenulisan skripsi ini.

Penulis memilih bahasan mengenai Dampak reformasi terhadap Elektabilitas Partai Golkar Pada Pemilu 1999 di Kabupaten Malang karena penulis banyak bergelut dan bersentuhan langsung dengan dunia politik. Penulis merasa tertarik dengan partai politik tersebut, selain itu penulis juga berasal dari Kabupaten Malang. Bahasan mengenai hal tersebut penulis rasa sangat cocok dan berkesan bagi penulis apabila penulis dapat menjadikannya sebuah karya penulisan sejarah yang dapat dibaca oleh orang lain. Pembahasan mengenai perpolitikan dalam kancah negeri begitu menarik bagi penulis, hal tersebut berlanjut dengan penulis yang sering menemui tokoh politik untuk bertukar pikiran mengenai banyak hal. Untuk semakin mempertajam pengetahuan penulis mengenai hal tersebut penulis juga membaca literatur dan buku yang berkaitan dengan dunia politik dan partai politik. Tujuan penulisan ini adalah untuk memperluas wawasan baik bagi penulis maupun pembaca itu sendiri. Diharapkan kepenulisan ini tidak hanya bermanfaat untuk menambah wawasan bagi

masyarakat luas namun juga dapat menambah literasi bagi peneliti lain untuk semakin memperkaya kepenulisan mengenai tema politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Dampak Reformasi terhadap elektabilitas partai Golkar pada pemilu 1999 di Kabupaten Malang dilakukan menggunakan penelitian historis. Penelitian historis sendiri mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui. Menurut Kuntowijoyo (2013) metode penelitian historis terdiri dari lima tahap, langkah tersebut adalah 1.) Pemilihan Topik, 2.) Heuristik (Pengumpulan sumber), 3.) Verifikasi, 4.) Interpretasi dan 5.) Penulisan. Perihal dengan data yang didapatkan penulis cukup beragam, yakni berasal dari ANRI berupa arsip, selain itu dari buku, artikel, jurnal, foto, koran, data kuantitatif, dan juga wawancara dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Data sumber yang menjadi inti dari penelitian penulis dapatkan langsung dari ANRI. KPU Kabupaten Malang, dan juga wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian penulis. Sumber dari KPU Kabupaten Malang penulis dapatkan dalam bentuk data kuantitatif yang akan menjadi pembanding di antara data sumber yang telah penulis dapatkan. Selain artikel dan jurnal penulis juga menggunakan data sumber dari buku yang juga menjadi salah satu pendukung penting penelitian penulis. Sumber foto penulis dapatkan dari ANRI, maupun arsip DPD Partai Golkar Kabupaten Malang. Penelitian ini juga didukung dengan arsip kelengkapan sumber juga berasal dari wawancara dengan narasumber bapak Gatot Setiawan sebagai mantan pengurus Kecamatan Partai Golkar wilayah Karangploso Kabupaten Malang Tahun 1995-2000 dan juga dari Bapak Asari (Asari) (54) sebagai salah satu aktivis Golkar di Kabupaten Malang dari tahun 1992-2000.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Partai Golkar Sebelum, Menuju, dan Sesudah Reformasi. Partai Golkar Setelah Adanya Pemilu 1997

Pembahasan mengenai kondisi partai Golkar setelah reformasi tidak lengkap apabila tidak dikaitkan terlebih dahulu dengan pemilu 1997 yang menjadi pemilu terakhir Golkar dalam genggamannya kekuasaan Soeharto. Ketika rezim Soeharto menjabat di Indonesia, pemilu rajin dilakukan tanpa masalah, namun baru dapat menganut asas *luber jurdil* pada tahun 1999 ketika B.J Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden naik menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatannya akibat desakan dari rakyat. Menuju Pemilu 1997 Golkar masih eksis dan percaya diri untuk turut serta. Dukungan masih banyak datang dari berbagai kalangan. Salah satu contoh golongan yang ikut mendukung kepemimpinan Soeharto adalah GP Ansor. Seperti yang tercantum dalam surat kabar Jawa Pos dengan *headline* "Ansor Dukung Penuh Pak Harto" yang mendukung penuh Soeharto untuk menjadi Presiden dan pemegang mandat MPR RI 1998-2003. Hal tersebut dikemukakan dalam

Konferensi besar ke-12 GP Ansor di Jakarta. Konferensi yang berlangsung dari 12 hingga 14 November 1997 ditutup secara resmi oleh Menag pada saat itu yakni Tarmizi Taher. Mulai dari jadwal kampanye pemilihan umum tanggal 29 April 1997 s/d 23 Mei 1997 Golkar masih dapat unjuk gigi dengan percaya diri hingga saat penetapan hasil pemungutan suara pemilu pada tanggal 10 Juni 1997 s/d 10 Juli 1997. Pemilu tahun 1997 hanya diikuti oleh tiga partai besar di Indonesia yakni PPP, PDI, dan Golkar.

Menurut Akbar Tandjung (Tandjung, 2007) berbagai akses yang dimiliki Golkar dalam pemerintah adalah hal yang tidak dimiliki oleh PDI dan PPP yang mana keduanya tidak memiliki peluang dalam hal tersebut. Lebih dalam beliau menambahkan bahwa keterlibatan tokoh, kader, dan fungsionaris Golkar dalam jabatan penting politik dan pemerintahan, selama kurun waktu Orde Baru telah membawa dampak yang positif bagi kinerja partai tersebut. Dampak positif tersebut secara membuat Golkar memiliki tiga keuntungan utama, yang pertama yakni Golkar dapat turut menentukan kebijakan di pemerintahan, yang kedua adalah terbangunnya jaringan Golkar dalam pemerintahan, dan yang ketiga adalah Golkar tumbuh menjadi organisasi politik yang memiliki sejumlah kader berpengalaman luas di pemerintahan.

Kuatnya jaringan Golkar dalam pemerintahan baik secara Nasional maupun daerah juga didukung oleh pernyataan Bapak Gatot Setiawan (52) beliau merupakan mantan pengurus Kecamatan Partai Golkar untuk wilayah Karangploso periode (1995-2000). Beliau menuturkan tahun sebelum reformasi tidak terdapat isu politik tertentu dan semua sudah terkoordinir, tidak hanya hal tersebut Golkar juga dapat mengendalikan ormas yang ada. Bapak Gatot menambahkan bahwa tidak semua ormas di luar partai Golkar dapat dikendalikan oleh Golkar walaupun sebagian besar dapat dikendalikan. Golkar sendiri juga memiliki banyak ormas yang tersebar luas, bahkan instansi pemerintahan juga masuk dalam hal yang dapat dikendalikan oleh partai Golkar seperti yang disampaikan oleh Bapak Gatot (52). Dari hal ini dapat ditelaah bahwa peranan partai Golkar di pemerintahan sangat kuat di masyarakat terutama di pemerintahan itu sendiri. Hal ini terjadi di sepanjang pemerintahan Soeharto ketika menjabat sebagai Presiden Indonesia

Partai Golkar Setelah Adanya Peristiwa Reformasi.

Setelah reformasi terjadi guncangan yang hebat di dalam tubuh Golkar. Terdapat perbedaan pendapat yang pada awalnya tidak diakui oleh Golkar namun tetap tercium oleh publik. Perpecahan tersebut kemudian mulai terkuak yakni Golkar terpecah menjadi dua kubu. Hal ini memang sangat bisa terjadi. Potensi konflik di Indonesia sangat tinggi, hal ini disebabkan karena sifat heterogenitas di berbagai sendi kehidupan (Agung, 2017) Seperti yang tertera pada surat kabar Jawa Pos edisi 4 November 1998. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa Golkar sudah tak satu suara, hal ini terlihat dari Ketua Golkar Akbar Tanjung membantah koleganya sendiri ketua FKP MPR Marzuki Darusman yang menyatakan Golkar meminta maaf kepada rakyat. Akbar Tanjung

mengakui, gagasan Golkar meminta maaf memang ada hanya perkembangan itu masih dalam internal Golkar (Jawa Pos, 1998).

Permasalahan ini kemudian berkembang dan Golkar menjadi dua golongan yang berbeda yakni golongan Progresif dan Konservatif. Golongan progresif sebagai golongan yang bersedia meminta maaf, sedangkan golongan konservatif sebagai golongan yang kontra dengan golongan progresif. Golongan konservatif dipimpin oleh Akbar Tanjung sedangkan Golongan progresif dipimpin oleh Marzuki Darusman. Partai Golkar tidak ingin sepenuhnya ikut bertanggung jawab atas kejatuhan tokoh yang dinilai sebagai wajah Golkar yakni Soeharto, namun juga tidak sepenuhnya merasa bersih atas segala peristiwa yang telah terjadi sepanjang perjalanan karir Soeharto ketika menjadi seorang Presiden. Perpecahan tersebut bisa dipahami mengingat partai mereka mau tidak mau juga ikut terlibat atas kerusuhan besar yang menyebabkan reformasi 1998 (Jawa Pos, 1998).

Perpecahan tidak hanya terjadi pada tubuh Golkar di pusat saja namun juga pada *elite* Golkar di Jawa Timur. Hal tersebut terjadi pada pengurus DPD Golkar Jatim periode 1998-2003. Perpecahan tersebut antara sesama wakil ketua H. Kahfan Arifin dan HM Hari Wahyudi dalam menyikapi usulan *re-call* an Ketua FKP DPRD Jatim Soeharto. Permasalahan mulai memanas ketika Hari Wahyudi yang dikenal sebagai "Orang Soeharto" diusir oleh Kahfan dari ruang ketua. Pada wartawan Hari Wahyudi mengaku tersinggung dengan perlakuan tersebut, dan bahkan ia berniat untuk melaporkannya pada ketua Golkar Jatim Sotomo Msi (Jawa Pos, 1998)

Guncangan yang datang dari berbagai peristiwa menjelang dan sesudah reformasi menjadikan Golkar tidak solid. Isu kepercayaan yang mulai merebak menjadikan permasalahan semakin besar hingga tercium media. Dapat dikatakan Golkar pada tahun ini berada pada titik ter *chaos* dalam sejarah perjalanan panjangnya. Pada era transisi ini Golkar menghadapi situasi yang kritis ketika banyak tekanan dan tuntutan untuk Golkar dibubarkan. Di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung pasca-Munaslub 1998, Partai Golkar tidak menunjukkan sedikitpun sikap dan kebijakan politik yang melawan arus reformasi (Effendy et al., 2012). Dapat dikatakan bahwa kebinekaan dalam tubuh Golkar mulai terkoyak, Bhineka Tunggal Ika selain direpresentasikan dalam perbedaan maupun pembedaan, namun juga ditampilkan dalam tema persatuan dan kesatuan (Utami & Widiadi, 2016) dalam hal ini partai Golkar justru mengoyak partai mereka sendiri menjadi sebuah perpecahan.

Permasalahan selanjutnya yang dialami Golkar adalah pencarian capres yang tepat untuk Golkar di masa depan. Kekosongan posisi ini cukup membuat Golkar kalang kabut, pertimbangan demi pertimbangan kemudian didiskusikan dan hasilnya adalah Wiranto di posisi pertama. Menurut pengamat politik Dr. Muhammad A.S Hikam menilai bahwa Golkar telah kehilangan kredibilitasnya. Beliau menambahkan bahwa Soeharto kebingungan mencari tokoh yang akan menjadi calon presiden mendatang, nama yang muncul untuk kemungkinan paling besar mengisi posisi tersebut adalah Wiranto. Golkar ingin mencalonkan Wiranto sebagai presiden semata-mata agar orsospol ini

tetap bisa bergandengan tangan dengan ABRI, menurut Hikam sebaiknya Wiranto menolak kesempatan tersebut karena akan merugikan dia sendiri dan ABRI (Jawa Pos, 1998). Di dalam militerisme terkandung nilai-nilai seperti penyeragaman, pengutamaan komando dan hierarki, anti dialog, serta penyelesaian konflik dengan cara kekerasan (Sapto, 2013). Ini lah mengapa tidak cocok apabila militerisme di salahgunakan agar rakyat takut dan patuh tanpa ada kesempatan untuk kebebasan berpendapat, dan mengkritik keputusan yang mungkin dirasa rakyat tidak cocok untuk negara. Sebagaimana kita tahu bahwa ABRI di Indonesia pada era Orde Baru hanya bagaikan alat dari pemerintah untuk mengontrol rakyat tanpa adanya kebebasan berpendapat dengan rasa aman.

Kondisi di Kabupaten Malang pada akhir tahun 1998 juga cukup menegangkan, tidak jauh berbeda dengan di Jakarta. Demo mahasiswa juga masih terjadi, meskipun demikian jumlah pendemo telah berkurang. Demo yang dilakukan mahasiswa tersebut terdiri dari lima kelompok mahasiswa mereka mendatangi RRI, Mapolresta Malang, Balai Kota Malang, dan Gedung DPRD. Kelompok mahasiswa tersebut menyebut diri bagian dari KMM (Komite Mahasiswa Malang) dan Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (PRD), ada juga kelompok mahasiswa yang menyebut diri mereka sebagai SEHATI (Seruan Hati Nurani) yang terdiri atas 50 mahasiswa. Nasib mahasiswa di Malang yang berunjuk rasa masih cukup beruntung dibandingkan dengan rekan-rekan pelajar di Jakarta, hal ini karena tindakan represif tidak terjadi tidak seperti unjuk rasa di Jakarta yang banyak mendapatkan tindakan represif (Pos, 1998e). Dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak hanya di ibukota namun kondisi perpolitikan di Malang juga sedang kacau, mahasiswa banyak yang turut serta turun ke jalan untuk menyuarakan suara perihal apa yang telah terjadi. Golkar seperti juga ikut dipaksa untuk ikut bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, berbagai kerusuhan dan unjuk rasa yang terjadi menjadikan Golkar terdesak dari segimanapun dan dimanapun bahkan di Malang.

Partai Golkar Setelah Adanya pemilu 1999.

Pemilu 1999 merupakan salah satu hal yang dinantikan rakyat Indonesia. Pemilu yang terjadi pada tanggal 7 Juni 1999 ini diikuti oleh 48 partai. Dari banyaknya partai yang mengikuti pemilu, perhatian banyak tertuju kepada partai Golkar yang sebelum reformasi menguasai perolehan suara. Lance Castels dalam (Salim et al., 1999) menjelaskan setidaknya terdapat 3 (tiga) kelompok dalam melihat perolehan suara Golkar. Kelompok pertama merupakan kelompok yang masih optimis dengan perolehan suara Golkar masih dapat menembus perolehan di atas 50 persen. Kelompok yang kedua lebih realistis daripada kelompok yang kedua, perolehan suara yang mungkin bisa diraih adalah 40 persen. Kelompok ketiga adalah kelompok yang pesimis dengan perolehan suara yang akan diraih Golkar, kelompok ketiga ini memperkirakan perolehan suara yang akan diraih Golkar ada pada kisaran 20-30 persen.

Menurut Leosuryadinata dalam *“the decline of the hegemonic party system in Indonesia Golkar after the fall of Soeharto”* bahwa partai Golkar yang terbentuk pada 1964 sebenarnya merupakan aliansi dari berbagai organisasi sayap kanan dan kelompok yang diubah menjadi mesin pemilihan baru oleh rezim Soeharto (Suryadinata, 2007). Setelah tergoncang dengan hebat pada reformasi 1998 Partai Golkar tidak dapat hancur begitu saja. Banyak masalah yang menerpa partai ini namun pada kenyataannya partai ini masih eksis, meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa lengsernya Soeharto pada reformasi 1998 menyebabkan keyakinan rakyat terhadap Partai Golkar menjadi jauh berkurang. Rakyat menjadi lebih berani dalam menyampaikan pendapat dan lebih bebas dalam memilih calon yang ingin mereka pilih walaupun kandidat tersebut berasal dari partai lain.

Penyelenggaraan pemilu legislatif 1999 secara yuridis diatur melalui undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Dalam undang-undang ini organisasi penyelenggaraan pemilu diatur mulai dari Bab III tentang penyelenggaraan dan organisasi yaitu dari pasal 8 hingga 23. Secara teknis pemilu legislatif 1999 dilakukan oleh KPU yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik, peserta pemilihan umum dan pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pada UU No. 3 1999 syarat keikutsertaan dalam pemilihan umum ditulis dalam Bab VII tentang pemilihan umum pasal 39 hingga 40. Setelah Soeharto lengser Wakil Presiden B.J Habibie naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto, B.J Habibie semakin berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan di pemerintahan. Sensitivitas politik masih cukup panas ketika B.J Habibi naik menggantikan Presiden Soeharto pada saat itu sehingga kewaspadaan dan kebijaksanaan B.J Habibie sangat diuji. Menurut Lance, Golkar dapat beradaptasi terhadap reformasi dengan dikemukakannya paradigma baru Golkar setelah Munaslub 1998 yang kemudian menghasilkan kepemimpinan baru di bawah Ir. Akbar Tanjung, dibawah kepemimpinannya Golkar menuju kearah perubahan transformasi konstitusional melalui Sidang Istimewa MPR November 1998, dengan ini Golkar dianggap telah melakukan proses reformasi konstitusional.

Pelaksanaan pemilu terjadi pada 20 Oktober 1999. Pemilu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Pelaksanaan yang berbeda dari pemilu sebelumnya ini benar-benar diusahakan berjalan dengan lancar dan jujur, perihal pemilu sebelum terjadinya reformasi dipenuhi dengan hilangnya kepercayaan rakyat pada pemerintah. Pemilu tahun 1999 dimenangkan oleh PDIP yang memperoleh mayoritas suara. Di Kabupaten Malang sendiri terdapat sedikit perseteruan mengenai pembagian kursi. Permasalahan yang telah terjadi berlarut-larut ini diselesaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian berikan kepada PKB, PDI, PKP, dan Partai GOLKAR. Keputusan tersebut tinggal menunggu SK dari Gubernur untuk meresmikan perolehan kursi. Perseteruan tersebut diselesaikan oleh sebuah tim yang disebut dengan Tim Sebelas. Sekretaris Tim Sebelas PPD II Kabupaten Malang yakni Jayus Atmojo menjelaskan bahwa pihaknya pada 11 November telah menghadap Tim 6 KPU di

Jakarta untuk penyelesaian persengketaan mengenai pembagian sisa kursi tersebut. Pihak Tim Sebelas Kabupaten Malang ke Jakarta menemui langsung Sekretaris Tim 6 yakni Saud Ari Tonang (Pos, 1999a).

Tabel. 1 Hasil Perolehan Sisa Kursi di Kabupaten Malang

No	Partai	Sisa Suara	Jumlah Tambahan Kursi
1	PKB	29 Ribu Suara	1
2	PDI-P	15 Ribu Suara	1
3	PKP	12 Ribu Suara	1
4	GOLKAR	11 Ribu Suara	1

(**Sumber:** Diolah dari Koran Jawa Pos edisi 17 November 1999 berjudul "Sisa Kursi untuk PKB,PDI-P, PKP, Golkar")

Penyebab dari persengketaan mengenai siapa partai yang berhak mendapatkan kursi tersebut berawal dari perbedaan pendapat antara partai kecil dan partai besar. Partai Besar tetap berpendirian sisa empat kursi dihitung berdasarkan sisa suara terbanyak secara berurutan, sedangkan partai kecil meminta agar sisa empat kursi dihitung secara kelompok. Dua SK sempat keluar dengan hasil yang berbeda, yakni SK yang dikeluarkan KPU yang isinya sisa kursi diberikan kepada PKP, PKB, PDI, dan Golkar. SK kedua dikeluarkan oleh PPI yang memberikan sisa empat kursi diberikan kepada PKB, PIB, Golkar, dan PNU. Keputusan kedua tersebut dikeluarkan melalui SK bernomor 219/K/PPI/IX/1999. Gubernur Jawa Timur pada waktu itu yakni Imam Utomo kemudian mengeluarkan SK Gubernur nomor 171-429/75/012/99 yang telah ditandatangani, dan menyatakan dengan tegas bahwa sisa empat kursi diberikan kepada PKB, PKP, PDI, dan Golkar. Keluarnya SK dari Gubernur ini sekaligus memberikan keputusan final mengenai perebutan sisa kursi di Kabupaten Malang (Jawa Pos, 1999).

Dari kasus tersebut dapat ditelaah bahwa partai lain telah menjadi semakin berani dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya mengenai kepentingan partai mereka. Terlepas hal tersebut adil atau sudah sesuai dengan hukum atau tidak. Tidak adanya dominasi kekuasaan oleh partai tertentu dalam hal ini memberikan efek yang cukup positif bagi kemajuan partai lain dalam memperjuangkan hak-hak rakyat melalui cara mereka sendiri. Partai Golkar memang tidak hancur begitu saja dan kepercayaan terhadap partai tersebut masih ada dalam diri sebagian masyarakat Indonesia pada saat itu, turunnya Soeharto dari tahta kepresidenan Indonesia tidak membuat Golkar kehilangan suara, walaupun tidak dapat dipungkiri Golkar memang kehilangan banyak suara dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Perbandingan suara tersebut juga cukup jelas terlihat di daerah Kabupaten Malang melalui perbandingan penurunan suara yang cukup signifikan antara suara Golkar pada pemilu tahun 1997 dengan suara Golkar pada pemilu tahun 1999 setelah terjadinya reformasi. Hal tersebut akan penulis jabarkan lebih jelas pada sub bab elektabilitas partai Golkar

Analisis Hasil Perbandingan pemilu 1997 dan 1999 Partai Golkar di Kabupaten Malang.

Perbandingan mengenai hasil pemilu 1997 dan pemilu 1999 perlu dijelaskan oleh penulis. Hal ini karena menurut penulis merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menganalisis elektabilitas partai Golkar. Tidak hanya menggunakan data kuantitatif yang mencakup hasil perolehan pemilu, namun juga melalui data kualitatif berupa analisis penulis mengenai permasalahan yang dilalui Partai Golkar dalam melalui berbagai data yang penulis temukan. Dalam hal ini pertama tama penulis perlu menjelaskan perbedaan jenis sumber yang diperoleh penulis untuk pemilu tahun 1999 dan 1997. Pada pemilu 1999 penulis dapat menemukan hasil perolehan suara yang lebih terperinci di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Malang pada waktu itu, sedangkan untuk perolehan pemilu 1997 penulis tidak dapat menemukan data yang lebih terperinci seperti tahun 1999.

Data yang dapat penulis peroleh langsung mengarah kepada hasil se- Kabupaten Malang dan bukannya terperinci seperti tahun 1999. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat regulasi yang berbeda antara badan yang berwenang dalam mengawasi pemilihan umum pada tahun 1997 dan tahun 1999. Pada tahun 1997 KPU belum terbentuk, istilah yang merujuk kepada badan semacam KPU pada tahun 1997 disebut dengan Panitia Pemilihan Daerah tingkat II untuk Kabupaten, sedangkan KPU telah terbentuk ketika pemilihan umum 1999 terlaksana. Berdasarkan KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 yang berisi mengenai pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.

Tabel. 2 Perolehan Suara Golkar di Kabupaten Malang pada Pemilu 1997

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	PPP	490.395
2	GOLKAR	744.078
3	PDI	69.904

(Sumber: Diolah dari Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) Kabupaten Malang 1997)

Tabel. 3 Perolehan Suara Golkar di setiap Kecamatan di Kabupaten Malang pada pemilu 1999

No	Kecamatan	Perolehan Suara	No.	Kecamatan	Perolehan Suara
1	Batu	8.753	19	Turen	8.668
2	Bumiaji	8.362	20	Dampit	10.859
3	Junrejo	6.130	21	Tirtoyudo	9.846
4	Pujon	9.216	22	Ampelgading	7.033
5	Ngantang	10.310	23	Sumbermanjin	8.348
6	Kasembon	3.417	24	Kepanjen	7.951

7	Singosari	12.581	25	Pakis Aji	5.426
8	Lawang	12.333	26	Wagir	5.894
9	Karangploso	8.209	27	Ngajum	5.459
10	Dau	6.686	28	Wonosari	6.555
11	Tumpang	6.371	29	Sumber Pucung	4.428
12	Pakis	7.148	30	Kromengan	4.828
13	Jabung	9.590	31	Pagak	3.224
14	Poncokusum o	7.485	32	Kalipare	5.582
15	Bululawang	3.216	33	Donomulyo	6.087
16	Wajak	5.400	34	Bantur	5.353
17	Tajinan	3.002	35	Gedangan	5.134
18	Gondanglegi	5.209			

(Sumber: Diolah dari KPU Kabupaten Malang 1997)

Pemilu 1997 dan pemilu 1999 memiliki perbedaan yang cukup jauh. Baik dari jumlah partai yang mengikuti, ketentuan, dan juga pelaksanaannya. Perbedaan pertama yang adalah pemilu 1997 diselenggarakan oleh badan penyelenggara pemilu yang memiliki struktur yang terdiri atas PPI ditingkatkan pusat, PPD I di provinsi, PPD II di kabupaten/Kotamadya, PPS di kecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan, dan KPPS. Bagi warga negara Indonesia yang berada diluar negeri dibentuklah PPLN, PPSLN, DAN KPPSLN yang bersifat sementara (Labolo & Ilham, 2017). Bagi masyarakat Kabupaten atau Kota Malang maka penyelenggaraannya akan diurus langsung oleh PPD II. Pada saat ini belum terdapat badan resmi yang mengatur mengenai sebuah badan independen yang khusus didirikan untuk melaksanakan pemilu di Indonesia, dan penyelenggaraan seperti ini telah berlaku dari 1977. Pemilu 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) badan ini merupakan pengganti Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang dibentuk oleh Presiden pada masa Orde Baru yakni dari tahun 1971 sampai 1997. Persamaan dari kedua Pemilu in adalah partai Golkar masih eksis untuk mengikuti pemilu 1999 walaupun dengan kondisi setelah mengalami guncangan akibat lengsernya Soeharto dari jabatan Presiden pada peristiwa Reformasi.

Perbedaan kedua yakni perolehan suara Golkar dan juga sistem kepartaian yang dianut pada pemilu 1997 dan 1999 di Kabupaten Malang. Tabel 1 memperlihatkan hasil perolehan suara dari Partai Golkar pada pemilu 1997 di Kabupaten Malang. Partai Golkar mengungguli suara di antara 2 partai lain yang mengikuti pemilu yakni PDI dan PPP. Sistem pemilu 1997 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada partai peserta pemilu. Semenjak pelaksanaan pemilu 1977 jumlah

partai di reduksi hingga tersisa tiga partai saja setelah pada pemilu sebelumnya yakni 1971 terdapat 10 partai. Partai yang tersisa kemudian hanya PDI, PPP, dan Golkar. Pada saat itu Indonesia menganut sistem tiga partai sehingga dapat dikatakan bahwa partai yang lainnya hanya meramaikan pemilu saja, hal inilah yang menyebabkan Golkar memiliki peluang yang sangat besar di setiap pemilu pada Orde Baru seperti nyaris tidak memiliki lawan politik (Labolo & Ilham, 2017).

Sistem kepartaian ini tentu saja bertolak belakang dengan sistem kepartaian pada pemilu 1999. Dimana perubahan kemudian terjadi dan sistem tiga partai kemudian di tiadakan. Masyarakat menjadi lebih bebas dalam menyuarakan pendapat dan partai-partai lain tidak perlu meleburkan diri atau direduksi lagi dengan partai lain seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah pada pemilu-pemilu sebelumnya. Kebebasan berpendapat dan juga kebebasan dalam hal berpolitik bukan terjadi begitu saja. Gejolak-gejolak yang telah terjadi di masyarakat menjadikan reformasi sebagai tonggak awal adanya kelonggaran dalam berpolitik dan bersuara, tanpa adanya tekanan, rakyat bebas menentukan nasibnya sendiri. Pemilu 1999 diikuti oleh banyak sekali partai, yang mana hal ini sangat jauh berbeda dengan pemilu pada tahun 1997 maupun pemilu-pemilu lain pada masa Orde Baru.

Perbedaan ketiga yakni perolehan suara dan juga Perolehan Kursi pada pemilu 1997 dan 1999. Pada Tabel 2 terdapat 35 kecamatan yang pada saat itu sebagian masih menjadi wilayah Kabupaten Malang. Perlu penulis garis bawahi bahwa terdapat beberapa Kecamatan yang pada tahun 1999 masih menjadi bagian dari Kabupaten Malang namun tahun selanjutnya bukan menjadi wilayah Kabupaten Malang lagi. Menurut Pemkot Batu dalam laman *website* resminya dijelaskan bahwa Kota Batu (Sebuah Kota di wilayah Jatim), terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari Kabupaten Malang yang sebelumnya merupakan bagian dari sub. Satuan wilayah pengembangan 1 (SSWP1) Malang Utara. Tak hanya Kecamatan Batu namun Kecamatan Junrejo dan Bumiaji juga kemudian menjadi wilayah Kota Batu ketika pada akhirnya wilayah tersebut memisahkan diri dari Kabupaten Malang. Hal tersebut perlu dijelaskan lebih rinci agar pembaca tidak salah memahami mengenai total perolehan suara pada waktu itu yang masih melibatkan wilayah-wilayah di Kota Batu.

Dapat dilihat bahwa lima peringkat teratas Kecamatan dengan perolehan suara Golkar tertinggi di Kabupaten Malang adalah 1. Singosari 2. Lawang 3. Dampit, 4. Ngantang, dan 5. Tirtoyudo. Golkar sendiri pada pemilu 1997 masih mengungguli dengan perolehan suara 774.078 sedangkan untuk lawannya yakni PDI mendapatkan perolehan suara 69.904 dan PPP 490.395 (lihat tabel 2). perolehan suara yang cukup besar di Kabupaten Malang sekaligus mengukuhkan posisinya di wilayah ini. Sedangkan untuk perolehan suara Golkar di Kabupaten Malang pada pemilu 1999 sangat turun dibanding sebelum reformasi yakni pada pemilu 1997. Posisi Golkar langsung merosot pada posisi tiga dengan perolehan suara yang hanya 243.110, sedangkan pada posisi pertama diisi oleh PDI-P dengan perolehan suara 510.450 dan posisi kedua oleh PKB dengan perolehan suara sebesar 392.472.

Perolehan suara Golkar yang cukup jauh setelah terjadinya rangkaian kejadian peristiwa reformasi 1998, walaupun demikian partai Golkar eksistensinya dapat dikatakan masih cukup kuat pada masyarakat Kabupaten Malang. Hal ini karena meskipun Golkar telah kehilangan kredibilitasnya pada reformasi 1998 namun masyarakat Kabupaten Malang masih banyak yang mempercayakan suara mereka kepada partai Golkar. Kekalahan pada pemilu 1999 juga tentu berdampak dengan perolehan kursi yang didapatkan oleh Golkar. Pada pemilu 1997 Golkar di Kabupaten Malang masih merajai perolehan kursi dengan jumlah perolehan 20 kursi. Disusul kemudian dengan PPP yakni 14 kursi dan PDI-P yang hanya mendapatkan perolehan 2 kursi. Hal ini berbanding terbalik lagi dengan perolehan kursi Partai Golkar di Kabupaten Malang pada tahun 1999. Partai Golkar hanya mampu mendapatkan 9 kursi, sedangkan partai pemenang pemilu yakni PDI-P mendapatkan 17 kursi diikuti di posisi kedua oleh PKB dengan perolehan kursi sebanyak 12 (lihat tabel 4).

Tabel. 4 peringkat tiga besar perolehan kursi di Kabupaten Malang pada pemilu 1999

No.	Nama Partai	Perolehan Kursi
1	PDI-P	17
2	PKB	12
3	GOLKAR	9

(**Sumber:** Diolah dari buku “sistem Kepartaian Indonesia” (2018) oleh Asep Nurjaman)

Penulis perlu menjelaskan perbedaan jenis sumber yang diperoleh penulis untuk pemilu tahun 1999 dan 1997. Pada pemilu 1999 penulis dapat menemukan hasil perolehan suara yang lebih terperinci di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Malang pada waktu itu, namun untuk perolehan suara tahun 1997 penulis tidak dapat menemukan data yang lebih terperinci seperti tahun 1999. Data yang dapat penulis peroleh (lihat tabel 1) data langsung mengarah kepada hasil se- Kabupaten Malang dan bukannya terperinci seperti tahun 1999. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat regulasi yang berbeda antara badan yang berwenang dalam mengawasi pemilihan umum pada tahun 1997 dan tahun 1999. Pada tahun 1997 KPU belum terbentuk, istilah yang merujuk kepada badan semacam KPU pada tahun 1997 disebut dengan LPU yang dibentuk oleh Presiden pada masa Orde Baru seperti yang telah penulis jelaskan pada poin pembahasan di atas. Untuk KPU telah terbentuk ketika pemilihan umum 1999 terlaksana dan didirikan oleh Presiden B.J Habibie yang pada waktu 1998 menjabat sebagai Presiden. KPU didirikan Berdasarkan KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999 yang berisi mengenai pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.

Dampak reformasi terhadap elektabilitas partai Golkar di Kabupaten Malang.

Bicara mengenai pemilu di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari partai politik dan elektabilitas yang partai tersebut. Elektabilitas merupakan kemampuan atau kecakapan untuk dipilih menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan. Yuli Rohmawai Menjelaskan bahwa elektabilitas merupakan ukuran atau tingkat keterpilihan suatu partai dalam pelaksanaan pemilu (Rohmawai, 2016). Menurutnya tingkat keterpilihan yang dimaksud adalah sejauh mana sebuah partai dapat dipilih rakyat pada saat pemilihan umum. Semakin besar suatu partai maka pengaruhnya terhadap masyarakat juga akan meluas, namun walaupun besar pengaruhnya terhadap masyarakat juga harus kembali sepadan dengan suara yang telah mereka ambil untuk partai tersebut. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja partai yang sedang menjabat harus sesuai dengan visi misi yang di gaungkan ketika pemilu akan dilakukan. Namun ada hal lain yang dapat dilakukan suatu partai untuk tetap berkuasa tanpa harus mengandalkan kepercayaan dan suara dari rakyat. Hal inilah yang dilakukan oleh salah satu partai yang sempat langgeng berkuasa di Indonesia yakni Golkar. Partai di Indonesia dari merdeka hingga sekarang ini dapat dikatakan cukup banyak, diantaranya banyak yang berlandaskan ideologi kebudayaan dan juga keagamaan. Banyak dari partai partai tersebut memiliki pengikut yang cukup besar sehingga pengaruh partai partai tersebut juga cukup kuat, terutama di daerah-daerah dimana pengaruh partai tersebut paling kuat.

Pemilihan kepala negara maupun kepala daerah merupakan salah satu produk dari reformasi sebagai bentuk demokratis. Dengan adanya pemilu kepala negara atau kepala daerah secara langsung maka orang dapat menentukan sikap mereka terhadap pemerintah daerah, yang mana pemilihan daerah merupakan perwujudan demokrasi dimana rakyat memasuki struktur pemerintahan melalui pemilihan (Sutrisno et al., 2018). Hal ini dapat terjadi apabila rakyat telah memiliki keinginan dan juga kepercayaan terhadap partai mana yang akan dipilih dalam pemilu. Kepercayaan diraih melalui sistem kampanye terlebih dahulu untuk menarik simpati dan hati rakyat, dalam hal ini kampanye dapat diidentifikasi juga sebagai marketing untuk menarik hati rakyat dan demi perolehan suara yang akan mereka berikan apabila kepercayaan telah diraih. Menurut Nursal (2004) marketing politik dibagi menjadi tiga yakni *push marketing*, *Pull marketing*, dan *Pass Marketing*.

Push marketing merupakan dorongan yang diberikan agar masyarakat pergi ke tempat pemungutan suara. Menurut wawancara dengan Bapak Asari (55) Golkar juga melakukan hal tersebut melalui orkes musik. Melalui hiburan yang di gelar oleh Golkar ini juga ikut mengajak warga untuk tidak Golput dan tetap memberikan suara di TPS terdekat. Yang kedua adalah *Pull Marketing* yakni pembentukan *image* calon pemimpin yang diinginkan oleh partai sehingga dapat membangkitkan keyakinan publik terhadap calon partai tersebut. Pada poin kedua dapat di telaah melalui wawancara dari apak Gatot (52) bahwa citra calon pemimpin dari Golkar telah ditanamkan dengan melalui berbagai cara salah satunya melalui sugesti perjalanan panjang di partai yang mendulang kesuksesan pembangunan, hal inilah yang masih menjadi hal yang

dipertimbangkan rakyat. Poin ketiga yakni *Pass Marketing* adalah strategi yang menggunakan individu atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi opini dari pemilih itu sendiri. Dalam poin ketiga tersebut menurut Bapak Gatot (52) salah satu strategi Golkar adalah dengan cara *door to door* menemui warga untuk menanamkan sugesti kepercayaan terhadap partai Golkar hal ini rutin dilakukan Golkar sebelum diadakannya pemilu. Pada pemilu 1999 cara tersebut masih dilakukan meskipun tidak berpengaruh banyak. Kekalahan yang dialami oleh Golkar di Pilkada Kabupaten Malang. Kepercayaan rakyat yang telah banyak menurun, serta sebagian rakyat yang telah berani memutuskan pilihan kepada partai lain secara bebas menjadikan strategi apapun yang dilakukan Golkar untuk meraih kemenangan terasa tetap sulit. Data kuantitatif yang telah penulis paparkan menggambarkan wujud dari kepercayaan masyarakat di Kabupaten Malang pada pemilu 1999 telah menurun jauh.

Selain teknik marketing kampanye yang dikemukakan Nursal, ada juga faktor lain yang mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar di Kabupaten Malang. Faktor yang mempengaruhi tersebut seperti yang dikemukakan Nursal (2004) yakni di antaranya adalah *curret event* (peristiwa mutakhir), *issue and policies* (isu kebijakan), *personal event* (peristiwa personal), identifikasi partai, *emotinal feeling* (perasaan emosional), *social imagery* (citra sosial), *epistemic issue* (isu epistemik), dan *candidate personality* (citra kandidat). Dari delapan faktor tersebut, penulis memilih *Social imagery* (citra sosial), *issue and policies* (isu dan kebijakan), serta *curret event* (peristiwa terkini) untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi elektabilitas Golkar. Alasan mengapa penulis hanya menggunakan tiga dari delapan faktor tersebut karena menurut penulis faktor-faktor tersebut lah yang paling mendekati dengan temuan penulis saat observasi. Faktor pertama adalah *Social imagery*, citra partai Golkar pada saat pemilu 1999 dapat dikatakan sedang jatuh dan terpuruk, masyarakat mulai banyak yang mencari partai lain yang sesuai dengan nurani mereka untuk lebih mengekspresikan suara mereka terhadap pemilu 1999. Poin selanjutnya adalah *issue and policies* atau yang disebut dengan isu dan kebijakan.

Isu reformasi kebijakan yang berubah sangat tidak menguntungkan partai Golkar, dimana partai Golkar sebelumnya telah menguasai birokrasi saat orde Baru. Isu reformasi yang telah merebak keseluruhan Indonesia menyebabkan masyarakat Kabupaten Malang memiliki opsi lain untuk dipilih, kebijakan-kebijakan di birokrasi yang sebelumnya dikuasai Golkar berubah menjadi lebih longgar dan menjadikan kemungkinan untuk memilih opsi partai lain semakin mudah. Poin ketiga adalah *Curret event*, poin ini merupakan poin utama yang menyebabkan kepercayaan rakyat jatuh terhadap partai Golkar. Banyak di antara calon pemilih yang kemudian berubah haluan dengan tidak memilih Golkar. Peristiwa ini juga menyebabkan demo dan unjuk rasa yang meluas tidak terkecuali di daerah Malang juga. Semua poin yang telah penulis pilih memiliki kaitan satu sama lain yang hampir tidak dapat terpisahkan, meskipun kejatuhan Golkar tidak terelakkan namun bukan berarti nama Golkar tidak memiliki pendukung lagi di Kabupaten Malang.

KESIMPULAN

Peristiwa reformasi tahun 1998 yang terjadi menyebabkan kejatuhan pada Partai Golkar di Kabupaten Malang. Nama dan citra partai yang telah terjaga selama puluhan tahun mulai terlihat kejatuhannya pada tahun 1997. Perbandingan hasil antara pemilu 1997 dan 1999 Partai Golkar yang begitu jelas di Kabupaten Malang cukup memperlihatkan bagaimana elektabilitas partai tersebut yang juga mengalami kejatuhan citra, kepercayaan, dan suara yang cukup banyak di Pilkada Kabupaten Malang. Ketidakpercayaan masyarakat pada Golkar yang mulai jatuh bukan berarti Golkar tidak memiliki pendukung, hal ini dapat dilihat dari hasil pemilu 1999 yang memperlihatkan dengan jelas bahwa meskipun Golkar telah jatuh namun masih mendapat perolehan suara yang cukup untuk menduduki posisi ketiga, hal tersebut tidak dapat terjadi apabila Golkar telah benar-benar kehilangan pendukung.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, D. A. G. (2017). Keragaman Keberagaman (Sebuah Kodrati Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila). *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 11(2), 151–159. <https://doi.org/10.17977/um020v11i22017p151>
- Asari, wawancara pribadi, 12 Mei 2021.
- Effendy, B., Thohari, H. Y., & Novianto, K. (2012). *Beringin membangun : Sejarah politik Partai Golkar*. Grafindo Khazanah Ilmu.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2017). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia : teori, konsep dan isu strategi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nurjaman, A. (2018). *Sistem Kepartaian Indonesia*. UMMPress.
- Nursal, A. (2004). *Political marketing: Strategi memenangkan pemilu*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jawa Pos. (1998, November 4). *Bantah Minta Maaf Golkar Pecah*.
- Jawa Pos. (1998, November 11). *Elite Golkar Jatim Retak gara-gara Isu recall Sam Soeharto*.
- Jawa Pos. (1998, November 6). *Golkar Pecah (lagi) antara Progresif dan Konservatif*.
- Jawa Pos. (1998, November 1). *Sebaiknya Wiranto Tolak Pencalonan Golkar*.
- Jawa Pos. (1998, November 13). *UU Unjuk Rasa Tak di Gubris, Demo dibubarkan*.
- Jawa Pos. (1999, November 17). *Sisa Kursi Untuk PKB, PDI-P, PKP, Golkar*.
- Jawa Pos. (1999, November 24). *SK Gubernur Selesaikan Rebutan Sisa Kursi*.
- Rohmawai, Y. (2016). Perubahan Elektabilitas Partai Peserta Pemilu di Yogyakarta Tahun 1971-1999. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(2), 312–319.
- Sahdan, G. (2004). *Jalan transisi demokrasi pasca Soeharto*. Pondok Edukasi.
- Salim, H., Fauzan, U., & Sholeh, U. I. (1999). *Tujuh mesin pendulang suara : pengenalan, prediksi, harapan Pemilu*. LKIS.
- Sapto, A. (2013). Perang, Militer dan Masyarakat: Pemerintahan Militer pada Masa Revolusi dan Pengaruhnya pada Indonesia Kini. *Sejarah Dan Budaya*, 7(1), 18–32.

- Suryadinata, L. (2007). The decline of the hegemonic party system in Indonesia: Golkar after the fall of Soeharto. *Contemporary Southeast Asia*, 29(2), 333–358. <https://doi.org/10.1355/cs29-2f>
- Sutrisno, S., Yuningsih, N. Y., & Agustino, L. (2018). Komparasi Teori Marketing Politik 4p Menurut Niffenegger dan 3p Menurut Adman Nursal. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 106. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1617>
- Tandjung, A. (2007). *The golkar way: Survival partai golkar di tengah turbulensi politik era transisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (1997). *Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Panitia Pemilihan daerah tingkat II (PPD II) Kabupaten Malang 1997*.
- Utami, I. W. P., & Widiadi, A. N. (2016). Wacana Bhineka Tunggal Ika Dalam Buku Teks Sejarah. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(1), 106. <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5150>